

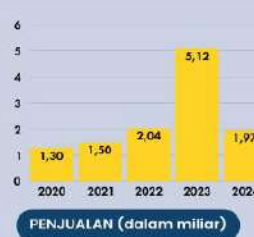
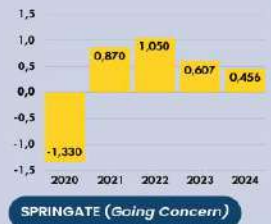
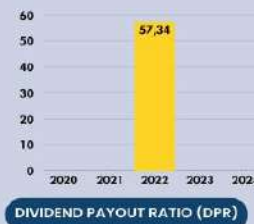


**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
PADA PERUMDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025**

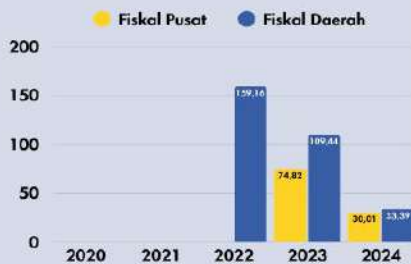
**Nomor : PE.09.03/LHP-315/PW14/4/2025
Tanggal : 24 Desember 2025**

Rasio Keuangan dan Operasional



Kontribusi Fiskal dan Dividen

- ✓ Terdapat kebijakan penggunaan laba Perumda
- ✗ Dividen yang disetorkan belum konsisten setiap tahun



*dalam juta

Tugas Pemerintah Daerah

- ✗ Tidak terdapat Penugasan Pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Kalbar

Dukungan Asta Cita dan MBG

- ✓ Asta Cita Nomor 2: Program Operasi Pasar
- ✗ Belum terdapat implementasi kegiatan menyasar MBG

Kualitas GRC

- ✗ Infrastruktur GRC belum memadai
- ✗ SDM pengelola GRC belum kompeten
- ✗ GCG: "Sangat Kurang"
MR: "Baik"
SPI: "Sangat Kurang"

Analisis Fraud

- ✗ Belum mengidentifikasi risiko fraud
- ✗ Terdapat kasus fraud yang masih dalam penanganan APH

Kebijakan Pemda

- ✗ Target kinerja keuangan dan operasional Perumda belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah

Infrastruktur GRC

- ✗ Belum Tersedia
 - Kebijakan Good Corporate Governance (GCG)
 - Code of Corporate Governance
 - Board manual
 - Self Assessment GCG
 - Internal Audit Charter (IAC)
 - Perencanaan berbasis Risiko
 - Maturitas Kapabilitas SPI
- PKPT:
 - Program Audit Kepatuhan
 - Program Audit Kinerja
 - Program Pengawasan Tata Kelola Manajemen Risiko
- ✓ Tersedia
 - Code of Conduct
 - Kebijakan Manajemen Risiko
 - Risk Register
 - Pelaksanaan Mitigasi Risiko
 - Maturitas Penerapan MR
 - Committee Audit Charter

Rekomendasi

- ➡ Peningkatan profitabilitas
- ➡ Penetapan target perbaikan kinerja keuangan dan operasional
- ➡ Evaluasi atas survei kepuasan pelanggan
- ➡ Menyusun dan menetapkan perangkat kebijakan GRC
- ➡ Updating risiko dan evaluasi rutin
- ➡ Memperkuat fungsi SPI
- ➡ Perencanaan pelatihan SDM terkait GRC
- ➡ Menyusun kebijakan anti-fraud
- ➡ Mengidentifikasi dan mengelola risiko fraud
- ➡ Berkoordinasi dengan Pemda untuk mengintegrasikan target dalam dokumen perencanaan daerah





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428
Situs: www.bpkp.go.id HelpDesk WhatsApp: wa.me/+628115741400

Nomor	: PE.09.03/LHP-315/PW14/4/2025	24 Desember 2025
Lampiran	: Tiga Berkas	
Hal	: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025	

Yth. Direktur Utama Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat
di Pontianak

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, selanjutnya disebut "Perusahaan".

Menurut pendapat kami, secara umum akuntabilitas kinerja dan keuangan Perusahaan sudah dilaksanakan dengan cukup memadai, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen Perusahaan, yaitu (1) operasional dan pelayanan Perusahaan belum sepenuhnya didukung oleh kinerja keuangan yang sehat, (2) kontribusi Perusahaan terhadap fiskal daerah terbatas, (3) infrastruktur *good corporate governance* (GCG), manajemen risiko, pengendalian internal, serta sistem *anti-fraud* belum tersedia secara memadai dan belum didukung oleh SDM yang kompeten, dan (4) kebijakan dan target kinerja Perusahaan yang terintegrasi belum tampak dalam dokumen perencanaan daerah.

Hal-hal tersebut perlu diperkuat agar Perusahaan mampu dan memperbaiki kinerja keuangan dan operasional, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

Uraian lebih lanjut disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



rekomendasikan kepada Direktur Utama Perusahaan untuk menjalankan rencana aksi tidak lanjut hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2.

Hasil pengukuran ini terbatas hanya ditujukan bagi pihak penerima laporan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Uraian selengkapnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan serta rekomendasinya kami sajikan dalam BAB II.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Akuntan Negara
2. Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha

Hemat kertas, hemat anggaran. Dengan tidak mencetak dokumen ini (terkecuali sangat diperlukan), kita telah mendukung program efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Layanan Pengaduan: Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, laporkan melalui wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239.



Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio BOPO	7.59%	8.19%	11.09%	60.83%	15.02%
Tren	Fluktuatif				

Secara keseluruhan, BOPO Perusahaan fluktuatif, tetapi cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada tahun 2020-2023 dan penurunan signifikan pada tahun 2024. Perusahaan menunjukkan kinerja efisiensi yang baik selama periode 2020–2024 karena mayoritas rasio BOPO berada jauh di bawah ambang batas ideal 50%. Namun, adanya peningkatan pada tahun 2023 yang melampaui standar ideal mengindikasikan adanya masalah operasional signifikan pada tahun tersebut meskipun berhasil diturunkan kembali pada tahun 2024.

Kondisi ini menggambarkan efisiensi pengendalian biaya operasional Perusahaan secara umum sudah cukup baik, tetapi belum konsisten.

d. Rasio *Dividend Payout Ratio* (DPR)

Hasil analisis DPR atas laporan keuangan *audited* tahun 2020 s.d. 2024 pada Perusahaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio DPR	0,00%	0,00%	57,34%	0,00%	0,00%
Tren	Fluktuatif				

Secara keseluruhan, DPR Perusahaan menunjukkan tren fluktuatif, tetapi cenderung stagnan. Hal ini terlihat dari DPR tahun 2022 ada penyetoran dividen sebesar Rp100.000.000,00, tetapi tidak ada penyetoran selama tahun 2020 – 2021 dan 2023 – 2024 sehingga belum mampu mencapai angka ideal sekitar 30%.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Perusahaan belum memiliki kemampuan untuk membagikan dividen kepada pemilik modal karena mengalami kerugian berturut-turut pada tahun 2020 – 2021 dan laba yang cenderung kecil pada tahun 2023 – 2024.

e. Analisis *Going Concern*

Hasil analisis *going concern* atas laporan keuangan *audited* tahun 2020 s.d. 2024 pada Perusahaan dengan menggunakan rumus *Springate* sebagai berikut:

Uraian	Tahun
--------	-------



	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai <i>Going Concern</i> (S)	-1.33	-0.87	1.05	0.66	0.46
Indikator <i>Going Concern</i>	Berisiko bangkrut	Berisiko bangkrut	Tidak berisiko bangkrut	Berisiko bangkrut	Berisiko bangkrut
Tren	Fluktuatif				

Rincian lebih lanjut atas analisis *going concern* BUMD tahun 2020 s.d. 2024 pada Lampiran 2.

Kondisi fluktuasi nilai *going concern* mengindikasikan bahwa posisi keuangan Perusahaan belum stabil serta kemampuan dalam menjaga likuiditas, profitabilitas, serta efektivitas pemanfaatan aset belum konsisten karena hanya pada tahun 2022 nilai *going concern* (S) mampu melebihi 0,862.

Hasil *analisis going concern* secara umum menunjukkan risiko kebangkrutan dan keberlangsungan usaha Perusahaan perlu mendapat perhatian serius dari manajemen Perusahaan.

f. Tren Penjualan

Hasil analisis tren penjualan atas laporan keuangan *audited* tahun 2020 s.d. 2024 pada Perusahaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total penjualan per periode	1.305.013.433	1.503.202.902	2.043.507.175	5.127.965.865	1.975.896.964
Pertumbuhan penjualan (%)	23,44	15,19	35,94	150,94	-61,47
Kontribusi penjualan segmen utama (%)	99,27%	85,99%	84,23%	77,05%	31,13%
Tren	Fluktuatif				

Secara keseluruhan tren, penjualan Perusahaan menunjukkan tren fluktuatif. Namun, Perusahaan menunjukkan keberhasilan strategi ekspansi dan diversifikasi yang membaik, yang terlihat dari penurunan konsisten kontribusi segmen utama menjadi hanya 31,13% pada tahun 2024.

Kondisi ini menandakan bahwa Perusahaan semakin berhasil menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, meskipun laju pertumbuhan penjualan tidak dapat dipertahankan secara konsisten.

g. Tren Pertumbuhan Pelanggan

Hasil analisis tren pertumbuhan pelanggan atas laporan keuangan *audited* tahun 2020 s.d. 2024 pada Perusahaan, menunjukkan hasil sebagai berikut:



Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggan aktif (orang)	24	35	41	146	174
Penambahan pelanggan baru (orang)	0	11	6	105	28
Pertumbuhan pelanggan bersih (%)	0.00%	45.83%	17.14%	256.10%	19,18%
Tren	Fluktuatif				

Pertumbuhan pelanggan Perusahaan menunjukkan tren fluktuatif, tetapi cenderung meningkat meskipun dengan tingkat pertumbuhan pelanggan yang tidak konsisten.

Kondisi ini mengindikasikan keberhasilan strategi Perusahaan dalam perluasan unit usaha dari tahun ke tahun, tetapi terdapat kelemahan dalam mempertahankan konsistensi pertumbuhan pelanggan.

h. Kualitas Pelayanan kepada Pelanggan

Hasil analisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pengguna jasa tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat penyelesaian keluhan (%)	82%	100%	100%	100%	100%
Kepuasan pelanggan (Skor 1-5 atau %)	76,46	N/A	87,66	71,54%	50,00%
Tren	Menurun				

Secara keseluruhan, tren kualitas pelayanan kepada pelanggan Perusahaan menurun dalam periode lima tahun. Meskipun tingkat penyelesaian keluhan terus mencapai 100% selama 2021-2024, tingkat kepuasan pelanggan semakin menurun.

Kondisi ini mengindikasikan Perusahaan memang berhasil merespons keluhan pelanggan, tetapi gagal memberikan respons yang berkualitas atas keluhan maupun pengembangan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

i. Kualitas Produksi Barang/Jasa

Hasil analisis kualitas produksi barang atau jasa tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produk/jasa memenuhi standar mutu (%)	75,00%	50,00%	33,33%	87,50%	100%
Tren	Fluktuatif				



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pemerintah Pusat: Badan, PPh 21, PPh 22, PPh 23	-	-	-	74.818.760	30.007.940
Sub Jumlah	-	-	-	74.818.760	30.007.940
Pemerintah Daerah:					
Dividen	-	-	100.000.000	-	-
PKB, PBB, Retribusi	-	-	59.162.504	109.445.559	33.398.074
Sub Jumlah	-	-	159.162.504	109.445.559	33.398.074
Jumlah	-	-	159.162.504	184.264.319	63.406.014

Dengan seluruh penyertaan modal senilai Rp49.912.130.204,00, kontribusi fiskal Perusahaan baru tercatat mulai tahun 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Secara akumulatif, total setoran pajak dan dividen yang diberikan Perusahaan dalam tiga tahun terakhir bahkan belum mencapai 1% dari total modal yang telah disetorkan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan Perusahaan belum mampu memaksimalkan modal yang diterima untuk menghasilkan laba proporsional yang dapat dikembalikan kepada daerah dalam bentuk pajak maupun dividen.

c. Kapasitas Perusahaan dalam Melaksanakan Tugas Pemerintah

Tidak terdapat Penugasan Pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Perusahaan sehingga Perusahaan tidak memiliki mandat operasional yang secara eksplisit mengatur tugas pelayanan yang harus dijalankan.

d. Peran Perusahaan atas Asta Cita Presiden dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Perusahaan secara tidak langsung telah berperan dalam mendukung Program Presiden melalui Asta Cita Nomor 2, yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. Peran tersebut direalisasikan melalui kerja sama antara Perusahaan dengan OPD di Provinsi Kalimantan Barat dalam program operasi pasar yang diselenggarakan setiap tahun.

Namun, belum terdapat kegiatan Perusahaan yang secara langsung mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena belum ada permintaan atas keterlibatan Perusahaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, prioritas Perusahaan masih pada menjalankan lini usaha yang ada.



b. SDM Pengelola GRC di Perusahaan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan GRC pada Perusahaan sangat terbatas. Saat ini, personil yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola GCG belum tersedia sehingga fungsi tata kelola belum berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Sementara itu, pengelola manajemen risiko atau *risk officer* telah ditetapkan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan proses manajemen risiko, personil yang ditugaskan belum memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sertifikasi, diklat, maupun *workshop* terkait manajemen risiko.

Unit SPI telah tersedia secara struktural, tetapi pelaksanaan fungsi pengawasannya belum maksimal karena hanya terdiri dari satu orang pegawai yang belum memiliki kompetensi memadai terkait pengawasan intern.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pengelola GRC agar Perusahaan dapat menerapkan prinsip tata kelola yang baik, mengelola risiko secara efektif, serta memperkuat sistem pengendalian internal.

c. Kualitas Hasil Penilaian GRC pada Perusahaan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja Perusahaan tahun 2024 menyimpulkan bahwa kualitas penerapan GCG memperoleh predikat “Sangat Kurang”, penerapan manajemen risiko memperoleh predikat “Baik” walaupun dokumen risiko masih menggunakan dokumen tahun 2023, dan kapabilitas SPI memperoleh predikat “Sangat Kurang”.

Terhadap belum optimalnya penerapan GRC Perusahaan, kami rekomendasikan kepada Direktur Utama Perusahaan agar melakukan langkah-langkah perbaikan, yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan perangkat kebijakan GRC secara bertahap, meliputi kebijakan GCG, *Code of Corporate Governance*, *Board Manual*, serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar tata kelola Perusahaan;
- b. Menerapkan manajemen risiko yang memadai melalui *updating* dan evaluasi rutin atas daftar risiko, penilaian, mitigasi, dan melakukan monitoring risiko secara berkala;
- c. Memperkuat fungsi SPI dengan memfasilitasi pegawai yang ditunjuk sebagai SPI untuk mengikuti pelatihan terkait pengawasan intern, menyusun PKPT, serta mengoptimalkan kegiatan audit kepatuhan, audit kinerja, dan pengawasan tata kelola manajemen risiko; dan



kegiatan usaha tanpa adanya target kinerja yang jelas sebagai turunan dari RPJMD, RKPD, maupun kebijakan strategis Pemerintah Daerah sehingga kontribusi Perusahaan terhadap peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan publik belum maksimal.

Terhadap belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah tersebut, kami rekomendasikan kepada Direktur Utama Perusahaan untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan target BUMD dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD) sehingga kontribusi Perusahaan menjadi indikator kinerja formal yang terpantau.



No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut
6	Proses manajemen risiko, baik pada tahap identifikasi, analisis, penilaian, hingga pemantauan atas risiko <i>fraud</i> belum berjalan secara formal dan terstruktur.	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan <i>anti-fraud</i> ; dan b. Mengidentifikasi risiko <i>fraud</i> dan melaksanakan penilaian, pengendalian, dan monitoring pengendalian, serta pelaporan atas keterjadian risiko <i>fraud</i> .	Akan Ditindaklanjuti
7	Belum ada target kinerja yang jelas sebagai turunan dari RPJMD, RKPD, maupun kebijakan strategis Pemerintah Daerah, sehingga kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan publik belum optimal.	Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan target BUMD dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD), sehingga kontribusi BUMD menjadi indikator resmi yang dipantau.	Akan Ditindaklanjuti

